

# Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan

Bambang Kismono Hadi dan Machmud Syafrudin





## Federal Republic of Germany Foreign Office

The creation, translation and publication of this CSO toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Perumusan, penerjemahan dan publikasi dari *Toolkit* ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

# **Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan**

*Bambang Kismono Hadi  
Machmud Syafrudin*

## Penulis

Bambang Kismono Hadi adalah Ketua Jurusan Pascasarjana Manajemen Pertahanan Institut Teknologi Bandung.  
Machmud Syafrudin adalah lulusan S2 - Development Studies Institute Teknologi Bandung

## Editor

Sri Yunanto  
Papang Hidayat  
Mufti Makaarim A.  
Wendy Andhika Prajuli  
Fitri Bintang Timur  
Dimas Pratama Yudha

## Tim Database

Rully Akbar  
Keshia Narindra  
R. Balya Taufik H.  
Munandar Nugraha  
Febtavia Qadarine  
Dian Wahyuni

## Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor *Tool* ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah *Tools* ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

## *Tool* Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan

*Tool* Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*. *Toolkit* ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. *Toolkit* ini terdiri dari 17 *Tool* berikut :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar   | 9. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan          |
| 2. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan                                      | 10. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian   |
| 3. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 11. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan             |
| 4. Reformasi Tentara Nasional Indonesia  | 12. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia   | 13. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan     |
| 6. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara                                      | 14. Komisi Intelijen   |
| 7. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah                                   | 15. Program Pemolisian Masyarakat                            |
| 8. Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia                   | 16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan        |
|  | 17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan       |

## IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

## DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

## Layout

Nurika Kurnia

Foto Sampul © Pesawat PBB: <http://worldairlinenews.files.wordpress.com/2009/06/un-united-nations-dc-9-87-swiftair-imd-airways-dc-9-87-ec-ksf-whitegrd-pmi-kv1r.jpg>, Gedung PBB :<http://clubs.arizona.edu/~amun/unbuilding.jpg>, 2009  
Ilustrasi cover Nurika Kurnia

© IDSPS, DCAF 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bumbu Pasar Minggu, 12520 Jakarta-Indonesia.  
Telp/Fax +62 21 780 4191  
[www.idspss.org](http://www.idspss.org)

## Kata Pengantar

*Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)*

*Tool* Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sector keamanan. *Tool* ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-aktor termarginalisasi dan membawa proses perumusan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan
- Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait
- Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik
- Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media
- Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada
- Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal
- Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan
- Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik
- Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen
- Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan
- Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan
- Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan
- Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan
- Mempromosikan pemerintah yang responsif

- Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat
- Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis
- Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hādala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari komunitas OMS Indonesia.

*Institute for Defence, Security and Peace Studies* (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari *Tool* Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. *Tool* ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (*workshop*) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Tool* ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, *tool* ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole  
Deputy Head Operations NIS  
and Head Asia Task Force

## **Kata Pengantar**

*Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)*

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangunya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembari melihat efektivitas dan persinggungan stretegis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaarim A  
Direktur Eksekutif IDSPS

# Daftar Isi

Akronim	vii
1. Pengantar	1
2. Pengertian Operasi Perdamaian	3
3. Peran Militer Sebagai Penjaga Perdamaian	4
4. Profil Anggota Penjaga Perdamaian	5
5. Konsep Pelatihan Bagi Anggota Penjaga Perdamaian	7
6. Pembekalan Budaya	10
7. Konsep Pembekalan Budaya dalam Suatu Program Pelatihan	12
8. Penutup	15
9. Daftar Pustaka	15
10. Bacaan Lanjutan	16
11. Lampiran	17

# Akronim

<b>ABCA</b>	Australia Cultural Awareness
<b>CA</b>	Cultural Awareness
<b>CCC</b>	Cross Cultural Communication
<b>CQ</b>	Cultural Quotation
<b>KONGA</b>	Kontingen Garuda
<b>LSM</b>	Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>MOOTW</b>	Military Operations Other Than War (Operasi Militer Selain Perang)
<b>PBB</b>	Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>Polri</b>	Kepolisian Republik Indonesia
<b>SGTD</b>	Standardized Generic Training Modules
<b>TAP MPR</b>	Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
<b>TNI</b>	Tentara Nasional Indonesia
<b>UN DPKO-TES</b>	The United Nations Departemnet of Peacekeeping Operations, Training and Evaluation Service
<b>UNEF</b>	United National Emergency Force
<b>UNIFIL</b>	United Nations Interim Force in Lebanon
<b>USMC</b>	United States Marine Corps
<b>UUD RI</b>	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

# Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan

## 1. Pengantar

Keikutsertaan Indonesia dalam misi operasi perdamaian PBB merupakan kontribusi nyata pemerintah Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI. Keikutsertaan ini sudah dimulai sejak tahun 1957, dengan pengiriman satu batalyon infanteri untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Mesir, yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda I / United Nation Emergency Force (KONGA-1/UNEF). Sejak saat itu, kontingen Indonesia yang dikirim dalam misi perdamaian PBB dinamakan Kontingen Garuda / KONGA.

Sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan terletak di Asia, keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sangat diharapkan, karena dapat dipandang sebagai penyeimbang di dalam komposisi misi perdamaian PBB. Hal ini ditambah dengan kenyataan, bahwa konflik yang terjadi saat ini, sering melibatkan Negara muslim atau Negara berpenduduk muslim, seperti yang terjadi di Bosnia, Lebanon, Irak bahkan Darfur di Afrika. Kehadiran Negara berpenduduk muslim seperti Indonesia di Negara-negara yang tengah menghadapi konflik tersebut tentu dapat menjadi penyeimbang yang penting dan representatif.

Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sampaisaat ini berlangsung sukses dan sangat dihargai oleh PBB maupun Negara-negara lain. Mochamad Slamet Hidayat, Direktur Multilateral Departemen

Luar Negeri RI, ketika diminta komentarnya pada saat pengiriman Kontingen Garuda XXIII-A/UNIFIL ke Lebanon, menyatakan bahwa:

*"...Kita harus melihatnya dari konteks keinginan dan peranan Indonesia dalam memberikan sumbangan untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah secara keseluruhan. Dan, menurut pandangan beberapa Negara, Indonesia dianggap mempunyai porsi peranan lebih besar dalam menyelesaikan masalah Timur Tengah. Pengiriman ini pun, berdasarkan konstitusi kita, merupakan kewajiban. Selain itu, bentuk diplomasi dalam meningkatkan citra Indonesia secara keseluruhan".<sup>1</sup>*

Pendapat senada dikemukakan oleh Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Mr. Mohamed El Sayed Taha, yang menyatakan bahwa sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kehadiran Indonesia, bersama Malaysia dan Brunei Darussalam, dapat menjadi penyeimbang bagi pasukan PBB di Lebanon, dan ini sangat representatif.<sup>2</sup> Demikian pula pendapat Mr. Fariz Mehdawi, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, yang menyatakan bahwa kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon akan menaikkan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB saat itu.<sup>3</sup>

Bagi lingkungan internal TNI, pengiriman pasukan di dalam misi perdamaian PBB berdampak positif, yaitu: menumbuhkan profesionalisme di lingkungan

1 Media Indonesia, "Pengiriman Pasukan Tingkatkan Citra Indonesia", Jakarta, 1 September 2006.

2 Harian Sinar Harapan (sore), "Pasukan Perdamaian RI di Lebanon Menjadi Penyeimbang", Jakarta, 30 Agustus 2006.

3 *Ibid.*

TNI, menaikkan citra TNI di dunia serta dalam upaya diplomasi pertahanan (*defence diplomacy*). Dengan masih adanya konflik-konflik bersenjata di dunia, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia akan tetap penting dan diharapkan sumbangsuhnya di masa depan.<sup>4</sup> Dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/25/IX/2005, 27 September 2005, dinyatakan bahwa ada beberapa prinsip yang menjadi landasan tentang partisipasi kontingen Indonesia untuk ikut serta dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB, yaitu:<sup>5</sup>

1. Partisipasi dalam tugas operasi perdamaian PBB didasarkan pada Undang-undang dan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu: alinea keempat Pembukaan UUD 1945, kebijakan politik bebas aktif, UU RI no 37/1999 ayat 10 tentang pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB ditetapkan oleh Presiden melalui konsultasi dengan DPR, serta TAP MPR RI No VII/2000 tentang peran TNI dan POLRI ayat 8.
2. Mandat yang sah, jelas, handal dan terukur dari Resolusi Dewan Keamanan PBB.
3. Adanya *Rule of Engagement* (RoE) yang jelas.
4. Keikutsertaan dalam mekanisme penentuan mandate.
5. Penghindaran campur tangan dan kepercayaan serta keyakinan dari pihak-pihak yang bertikai.
6. Keputusan politik pemerintah Indonesia dan dukungan rakyat Indonesia serta sebagai implementasi dari Piagam PBB.

Selanjutnya, dalam perkembangannya setelah diterbitkannya beberapa peraturan dan perundangan yang berlaku untuk TNI, maka pengiriman pasukan TNI untuk misi perdamaian PBB didasarkan pada:

1. Undang-Undang RI Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara Ayat 10, tentang partisipasi aktif TNI untuk ikut menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan regional maupun internasional.
2. Undang-Undang TNI Nomor 34/2004 Ayat 7, tentang salah satu tugas TNI untuk ikut berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB yang berdasarkan pada politik luar negeri Indonesia.
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007, 12 Januari 2007 tentang Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karya”, yang dijadikan sebagai landasan dan panduan untuk tugas-tugas TNI diantaranya tugas misi perdamaian PBB sebagai bagian tugas TNI di bidang Operasi Militer Selain Perang.

---

4 Menurut penulis, paling tidak ada 3 tugas TNI di masa depan yang penting, yang akan menaikkan citranya di dunia, selain menjaga kedaulatan Negara. Yaitu: satu, ikut terlibat dalam misi perdamaian dunia; dua, ikut serta dalam keamanan laut (*maritime security*); dan ketiga, terlibat dalam penanggulangan bencana.

5 Lampiran III, Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/25/IX/2005, 27 September 2005, *Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI Tentang Operasi Perdamaian Dunia*, halaman 4-5.

## 2. Pengertian Operasi Perdamaian

Kehadiran suatu operasi perdamaian dalam suatu Negara atau kawasan dilaksanakan setelah upaya-upaya perdamaian yang lain gagal dilaksanakan. *"..Peace operations embrace conflict prevention and peace-making, peace-keeping and peace-building. If the first trio is successful, violent conflict can be avoided and deployment of peace-keeping troops is not needed"*.<sup>6</sup> Artinya bahwa operasi perdamaian itu dilaksanakan setelah upaya pencegahan yang dilakukan oleh sejumlah pihak itu gagal dicapai.

Sebenarnya, pemeliharaan perdamaian tidak tercantum di dalam Piagam PBB. Namun untuk alasan tertentu, maka hal tersebut dapat dilakukan: *"..Peacekeeping as such, is not specially provided for in the Chapter, except for the provision that 'The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions' (Article29)"*.<sup>7</sup>

Selanjutnya tugas-tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pencegahan konflik (*Conflict prevention*), yakni langkah-langkah politis, diplomatis, nonmiliter yang proaktif melalui cara-cara dan saluran yang tepat untuk mencegah timbulnya pertikaian antara dua pihak di suatu Negara/kawasan agar tidak berkembang menjadi besar.
- b. Upaya Perdamaian (*Peace Making*), yakni cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan piagam PBB.
- c. Pemeliharaan Perdamaian (*Peace keeping*), yakni kegiatan penggelaran personel di negara/kawasan yang bertikai atas seizin pihak-pihak terkait.
- d. Pengokohan Perdamaian (*Peace Building*), yakni kegiatan untuk mengenali dan mendukung hal-hal yang dapat membuat/memperkokoh landasan perdamaian.
- e. Operasi Masa Damai (*Peace Time Operation*), yakni kegiatan operasi dalam menanggulangi bencana alam dan sebagainya.
- f. Operasi Penegakan (*Peace Enforcement*), yakni operasi penegakan perdamaian yang sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional yang berlaku, serta asas-asas partisipasi Indonesia.

6 Concluding Report 1997-2002, Challenges of Peace Operations into the 21st Century, Eldaners Gorab, Stockholm, Sweden, 2002, hal 266.

7 <http://www.un.org/aboutun/charter/>

### 3. Peran Militer Sebagai Penjaga Perdamaian

Dewasa ini, istilah Operasi Pemeliharaan Perdamaian merupakan salah satu peran militer dalam kosep operasi militer selain perang/*military operations other than war* (MOOTW). Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura menggunakan istilah ini, termasuk di lingkungan TNI sendiri. Peran ini dipandang sebagai kompetensi lain yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh pasukan militer dalam mendukung misi perdamaian PBB atau organisasi internasional lainnya.

Mariana Nuciari mengatakan bahwa paradigma baru ini harus disadari sebagai ini merupakan suatu peran baru bagi militer/angkatan bersenjata, khususnya bagi militer professional, yang dalam teori sosiologi militer disebut dengan istilah: *the military peacekeepers/ Pasukan Penjaga Perdamaian*.<sup>8</sup>

Menyiapkan pasukan perang untuk menjadi pasukan pemelihara perdamaian merupakan suatu hal baru yang menarik untuk disimak. Dalam dunia militer hal ini sangat bertolak belakang dengan tugas utamanya sebagai pasukan perang, namun realitanya tugas ini telah diperankan oleh para prajurit angkatan bersenjata di seluruh dunia. *"Peacekeeping is not a soldier's job, but only a soldier can do it" as shifted from "oral tradition" to written form.*<sup>9</sup> Pernyataan tersebut sangat relevan dengan keadaan saat ini yang memang menuntut peran aktif dari kalangan militer untuk tugas operasi perdamaian ini.

Robert Getso (2005) mengatakan bahwa menugaskan pasukan militer sebagai pasukan pemelihara perdamaian atau untuk tugas operasi non tempur memerlukan *a cross-cultural shift* pada masing-masing diri prajurit. Perubahan ini dinamakan perubahan psikologi dari budaya militer sebagai prajurit perang menjadi militer (yang sipil) yang bertugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian atau dalam istilahnya: *"a psychological shift—from the military culture of the war fighter to the civil-military culture of the peacekeeper"*, dengan implikasi sosial, perilaku, psikologi dan filosofi yang perlu diperhatikan dan dilatih.<sup>10</sup>

Selaras dengan pernyataan Robert Getso (2005), Mariana Nuciari (2002) menyebutnya kedua kemampuan tersebut sebagai suatu kemampuan yang tidak boleh dilepaskan satu dengan lainnya, tetapi sebagai kemampuan ganda yang tetap melekat bagi pasukan militer di masa kini.

*".....the military has to front within itself latent or manifest strains and contradictions between the culture of the warrior and the culture of the peacekeeper. This basic diversity is unavoidable, in the sense that it cannot be overcome by means of the reduction to the one or the other side of the coin."*<sup>11</sup>

8 Nuciari, Marina, *Flexibility Towards Diversity: New Skills for Military personel in PSOs*. University of Torino, Department of Social Sciences, 2002.

9 *ibid*

10 Robert Getso, *Preparing Warriors to be Peacekeepers*. [http://www.class.uidaho.edu/martin\\_archives/peace\\_journal/Peacekeeping/Peacekeeping1.doc](http://www.class.uidaho.edu/martin_archives/peace_journal/Peacekeeping/Peacekeeping1.doc)

11 Marina Nuciari (2002), *Flexibility Towards Diversity. New Skills for Military Personel in PSOs. Submitted to the Annual Conference 2002 of the Committee on Women in NATO Forces*, Brussel, NATO HQ.

## 4. Profil Anggota Penjaga Perdamaian

Berdasarkan konsep paradigma baru tersebut, khususnya tugas sebagai pemelihara perdamaian, tentunya program latihan yang diberikan kepada anggota pasukan juga berbeda dengan program latihan untuk tugas-tugas lain dalam konteks tugas militer untuk tujuan perang.

Paska berakhirnya perang dingin dan meningkatnya ancaman keamanan internasional, berimbas pula terhadap tuntutan tugas dalam pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian. Untuk itu hal ini juga menuntut latihan dan persiapan yang memadai dari pasukan penjaga perdamaian (baik sipil maupun militer) demi tercapainya misi tersebut.<sup>12</sup>

Persyaratan utama bagi personel untuk dapat diterjunkan dalam suatu misi penugasan PBB adalah dari mereka yang memang tidak bermasalah, baik untuk lingkup organisasi, maupun permasalahan lain yang terjadi di negara asalnya. Persyaratan tersebut adalah mereka haruslah orang-orang pilihan yang memang berasal dari keluarga yang tidak bermasalah, artinya kalau di rumah memang dia bermasalah, maka hal ini juga membawa dampak juga pada saat mereka bertugas di luar negeri.<sup>13</sup>

Anggota misi perdamaian PBB yang bertugas di suatu daerah operasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan misi penugasan tersebut. Dalam menjalankan misi tersebut mereka tidak hanya mewakili negara atau organisasi pengirimnya, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka

### Kotak 1 Dasar Hukum Terbaru Pengiriman Pasukan Perdamaian

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA

12. Kebijakan Kerjasama Internasional.

Kerjasama internasional dibidang pertahanan merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri, sehingga tidak akan mengarah atau suatu Pakta Pertahanan. Kerjasama internasional dibidang pertahanan dilaksanakan baik dalam rangka pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan.

Kendatipun demikian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan, penggunaan produk dalam negeri merupakan prioritas. Sedangkan pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam kerjasama internasional dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan serta diplomasi, dan untuk memecahkan masalah keamanan yang perlu untuk ditangani secara bersama. Dalam rangka ikut serta secara aktif mewujudkan perdamaian dunia, pengiriman pasukan perdamaian dilaksanakan hanya atas permintaan dan mandat dari Persatuan Bangsa-Bangsa.

12 *Training dan Preparation of Military dan Civilian Peacekeepers Summary of Proceedings Aberfoyle House*, Magee College, University of Ulster, 13–15 June 1996. [www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No10/Anyidoho.html](http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No10/Anyidoho.html) - 27k

13 Wahlgren, *The Training dan Preparation of Military Peacekeepers* [www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No10/Anyidoho.html](http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No10/Anyidoho.html) - 27

mewakili PBB selaku badan international yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan misi tersebut. Sehingga apapun tingkah lakunya baik yang bersifat positif maupun negatif akan berdampak terhadap lembaga PBB.

Dalam *The Challenges of Peace Operations: Into the 21st Century* (2000), dinyatakan bahwa setiap personel yang akan bertugas menjadi anggota penjaga perdamaian PBB haruslah ditentukan dahulu tentang persyaratan standar yang harus dimiliki sebagai anggota penjaga perdamaian. Mengapa persyaratan ini harus dimiliki oleh mereka yang akan menjalankan misi tersebut, hal ini penting karena terkait dengan analisa kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan.

Adapun profil dasar seorang penjaga perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

*“A peacekeeper should be capable of interoperating in a conflict or post-conflict area within a multinational and multidisciplinary environment, respectful of different cultures and guided by deep understanding of UN principles and of professional ethics, able to avoid conflict-escalation while ready to cope with it, and have a capacity for de-escalation. In addition, as pointed out by General*

*VP Malik at the New Delhi Seminar, a peacekeeper should have certain personality traits such as high morale, flexibility, autonomy, and initiative, tact, patience and diplomacy.”<sup>14</sup>*

Berdasarkan hal di atas, profil anggota pasukan penjaga perdamaian dapat digambarkan sebagai berikut:

<b>Interoperability</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multinational</li> <li>• Multidisciplinary</li> </ul>	<b>Escalation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoid</li> <li>• Cope dengan</li> <li>• Decrease</li> </ul>
<b>Respect</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culture/Religious</li> <li>• UN Principle</li> <li>• Duty</li> </ul>	<b>Personality Traits</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• High morale</li> <li>• Flexibility</li> <li>• Autonomy and initiative</li> <li>• Tact, Patience, diplomacy</li> </ul>

Dengan adanya persyaratan ketat sebagaimana di atas, adalah mutlak diberikannya pelatihan terlebih dahulu bagi para anggota satuan yang akan dikirim ke misi perdamaian di bawah PBB.

## Kotak 2

### Misi Perdamaian yang Pernah Diikuti Tentara Indonesia

Beberapa penugasan ke luar negeri yang pernah dilaksanakan oleh TNI diantaranya: ke negara-negara seperti Kongo pada tahun 1961 dan 1963, Vietnam pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1975, Irak tahun 1989, Namibia tahun 1989, Kuwait tahun 1992, Kamboja tahun 1993, Somalia tahun 1993, Bosnia tahun 1993 dan tahun 1996, Macedonia tahun 1997, Slovenia 1997, Kroasia 1995, Reblaka tahun 1997, Mozambik tahun 1994, Filipina tahun 1999, Tajikistan tahun 1998, Sieralion tahun 1999, Kongo tahun 2002 sampai dengan sekarang, Liberia tahun 2004 sampai dengan sekarang, Sudan tahun 2006 sampai dengan sekarang, Lebanon 2006 sampai dengan sekarang, Nepal tahun 2007 dan Unamed 2008.

**Sumber:** “Sosialisasi Pusat Misi Perdamaian”, <http://www.tni.mil.id/news.php?q=opn&cid=INT&id=113012006122425>

14 *Concluding Report 1997-2002*, Op.Cit, halaman, halaman 231.

# 5. Konsep Pelatihan Bagi Anggota Penjaga Perdamaian

## Pengertian Pelatihan

Jennifer V. Chandler (2005), dalam tesisnya yang Dalam laporan berjudul: *The Concluding Report (1997-2002) on the Challenges of Peace Operations into the 21st Century*, pelatihan didefinisikan sebagai berikut:

*Training is the provision of the technical and procedural knowledge and skills required in the performance of assigned duties; it is the development of predictable response to predictable situation.*<sup>15</sup>

Dalam pengertian di atas, pelatihan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan baik secara teknik dan prosedural dalam rangka mewujudkan suatu kinerja yang diharapkan sesuai dengan tuntutan tugas. Pelatihan itu sendiri merupakan suatu pengembangan antara respon harapan terhadap respon keadaan yang mungkin terjadi di medan operasi.

Untuk itu maka pelatihan harus mampu menjawab semua kemungkinan yang mungkin timbul di medan operasi, sehingga pelatihan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta menghadapi situasi yang mungkin muncul di lapangan. Dengan demikian maka kesesuaian antara pengetahuan dan ketrampilan yang berjudul *Why Culture Matters: An Empirically-Based Pre-Deployment Training Program*, menyatakan bahwa ada tujuh pertimbangan yang dapat dijadikan dasar untuk penyiapan suatu latihan praturgas (*pre-deployment training*) bagi pasukan yang akan berangkat ke medan tugas, yakni:

1. *When designing and presenting a pre-deployment training program, it is important set realistic expectations*, artinya bahwa dalam merancang dan menyiapkan suatu program latihan praturgas bagi militer yang ditugaskan dalam suatu tugas operasi harus realistis dengan tujuan yang diharapkan.
2. *To identify the mission of those units, the geographical scope of their operational environment, and if possible, the commander's intent*, artinya untuk dapat mengidentifikasi dari unit yang akan diterjunkan, lingkungan geografis dari penugasan, dan apabila memungkinkan maksud dan keinginan dari komandan.
3. *To know what interaction or impact a unit will have in the day-to-day mission operations or interaction with the local population*, untuk mengetahui interaksi atau dampak dari satuan tersebut terkait dengan keseharian dari misi tersebut, atau interaksi dengan penduduk di wilayah penugasan tersebut.
4. *Presenting an analysis of the operational environment based on military doctrine and needs*, memaparkan tentang suatu analisa daerah operasi berdasarkan doktrin dan kepentingan dari misi tersebut.
5. *To incorporate cross-cultural communication (CCC) training*, untuk memasukkan latihan komunikasi lintas budaya dalam latihan praturgas..
6. *To tie the training program to the appropriate educational level of learning*, menyesuaikan program latihan dengan tingkatannya.
7. *Depending on the mission and the audience*, tergantung pada misi dan para pesertanya.<sup>16</sup>

15 *Ibid.*

16 Jennifer V. Chdanler (2005), *Why Culture Matters: An Empirically-Based Pre-Deployment Training Program*, Naval Postgraduate School Monterey, California, halaman 35.

## Konsep Program Latihan Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian

Latihan bagi pasukan penjaga perdamaian sangatlah diperlukan agar mereka mampu mengatasi setiap tantangan yang berkaitan dengan karakteristik utama pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian, yaitu multi-disiplin (multidisciplinary), multi-negara (multinational), sangat kompleks dan banyak dipengaruhi perubahan situasi di lapangan.<sup>17</sup>

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan suatu operasi pemeliharaan perdamaian adalah ketersediaan suatu pool pasukan penjaga perdamaian yang lengkap dengan personelnya, baik dalam jumlah maupun kualitas serta pengiriman pasukan yang terorganisir dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan ini, maka negara-negara anggota PBB yang akan berkontribusi perlu menyiapkan personelnya, baik sipil, polisi, maupun militernya melalui latihan dan pendidikan.<sup>18</sup>

Ada keterkaitan yang erat antara PBB sebagai pengguna pasukan penjaga perdamaian dengan Negara Anggota PBB sebagai kontributornya. Pihak pertama selaku pengguna dari kontingen negara asal menyampaikan persyaratan apa saja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai untuk suatu misi perdamaian. Sedang pihak kedua selaku pengirim kontingen nasional berkewajiban untuk memenuhi standar yang diinginkan sehingga terdapat sinkronisasi antara kebutuhan dengan permintaan.

PBB sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi perdamaian tersebut menjadi media untuk berkoordinasi diantara negara-

negara anggota PBB dan PBB juga menyediakan petunjuk program pelatihan yang dapat digunakan sebagai panduan negara-negara anggota sebagai standar prosedur untuk mengembangkan program latihan. Lembaga tersebut dinamakan *The United Nation Department of Peacekeeping Operations, Training and Evaluation Service* (UN DPKO-TES) yang mempunyai tanggung jawab pokok untuk pengembangan dan pendistribusian panduan program latihan bagi pelaksanaan operasi perdamaian.<sup>19</sup> Masing-masing negara anggota dapat mengacu pada panduan tersebut sehingga dalam mengembangkan program latihan bagi kontingen nasionalnya dapat menghasilkan personel yang dapat memenuhi standar yang ditetapkan PBB.

DPKO telah mengembangkan suatu standar modul yang dapat digunakan oleh masing-masing Negara anggota PBB untuk dijadikan acuan dalam rangka menyelenggarakan suatu pelatihan. Paket ini merupakan *standardized generic training modules* (SGTM), yang terdiri dari 23 modul, yang meliputi tentang informasi tentang sistem PBB, *stress management, cultural awareness, personel security, human rights, media relations, logistics, medical*, dan lain-lain.<sup>20</sup> Selanjutnya, Negara-negara anggota dapat mengembangkan pelatihan sehingga dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian dan attitudes dari para anggota kontingennya yang diterjunkan sebagai anggota pasukan perdamaian PBB.

Situasi dalam misi operasi perdamaian sangatlah kompleks, dan setiap misi mempunyai perbedaan karakteristik dan sifat konflik. Tidak pernah ada dua misi operasi perdamaian yang memiliki kemiripan/sama, setiap misi adalah berbeda dan unik.<sup>21</sup> Dari sifat

17 Concluding Report 1997-2002, *Op.Cit.*, halaman 232

18 *Ibid*, halaman 233

19 *Ibid*, halaman 233.

20 [www.un.org/depts/dpko/training](http://www.un.org/depts/dpko/training)

21 Concluding Report 1997-2002, *Op.Cit.*, halaman 17.

dan karakteristik inilah maka setiap pelaksanaan suatu misi penugasan harus dipahami betul oleh semua pihak yang terlibat dalam misi penugasan tersebut.

Adapun keanekaragaman dalam suatu misi operasi perdamaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Keanekaragaman yang muncul dalam misi perdamaian tersebut, karena misi ini bukanlah misi untuk suatu tugas perang tetapi suatu misi yang sangat berbeda dengan tujuan untuk memulihkan situasi keamanan dan perdamaian di suatu kawasan.
2. Keanekaragaman sebagai suatu misi operasi perdamaian, karena didalamnya terdapat banyak misi operasi perdamaian baik untuk operasi pengawasan gencatan senjata, pencegahan konflik, pemulihan keamanan, dan lain-lain.
3. Keanekaragaman dalam hal ketidakpastian dan perkiraan baik dalam tempo/jangka waktu dari misi tersebut, keefektifitasan misi, opini publik pada setiap waktu penugasan, dan lain-lain

4. Keanekaragaman pasukan multinasional yang terlibat dalam setiap misi, yakni perbedaan bangsa, perbedaan kultur militer yang terlibat dalam penugasan, perbedaan peraturan dan sumber daya bagi mereka yang berkonfrontasi.
5. Keanekaragaman di medan operasi itu sendiri, terdapat banyak aktor yang terdapat dalam setiap wilayah konflik (masyarakat sipil seperti penduduk setempat, pengungsi, faksi yang bertikai, para politisi local, para personel/staf dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik nasional maupun internasional, perwakilan media, dan lain-lain.<sup>22</sup>

### **Kotak 3** Contoh Pembekalan TNI Kontingen Garuda

#### **Pembekalan TNI Kontingen Garuda XXVIII-A/UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon)**

Pembekalan yang diberikan kepada tentara Indonesia yang dikirim ke Libanon meliputi hal yang bersifat taktis dan teknis militer, komando dan pengendalian, komunikasi, serta pengetahuan lain seperti pengenalan budaya lokal, pengetahuan HAM serta kemanusiaan. Sebelum berangkat mereka juga akan melaksanakan drill teknis berupa manuver lapangan di sekitar tempat pelatihan. Misalnya bagi Satgas Maritime Task Force Kontingen Garuda berlatih di Laut Jawa. Pasukan perdamaian ini sendiri merupakan prajurit terpilih yang telah melalui Seluruh personel merupakan prajurit Koarmatim terpilih dari proses seleksi yang meliputi kemampuan berbahasa Inggris, general chek-up kesehatan dan kejiwaan serta wawancara.

Kasum TNI menginstruksikan agar dalam pelaksanaannya nanti di lapangan, Satgas harus bekerja berdasarkan pola operasi sesuai standar PBB dan juga harus memperhatikan budaya lokal. Hal tersebut akan membantu menjadi penengah secara imparial atau tidak memihak pada salah satu kelompok dari pihak-pihak yang bertikai. Sebagai catatan Indonesia merupakan negara di Asia yang diminta langsung oleh UNIFIL untuk mengirimkan pasukan lautnya dalam misi ini.

**Sumber:** "Indonesia Kirim Kapal Perang ke Libanon", <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006120845>

## 6. Pembekalan Budaya

Salah satu faktor penting kesuksesan misi operasi perdamaian adalah pembekalan budaya yang memadai bagi anggota pasukan. Pembekalan budaya ini penting, agar anggota pasukan dapat berinteraksi dengan penduduk setempat maupun dengan anggota pasukan dari Negara-negara lain.

Dalam terminologi militer, ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli dan peneliti untuk menyebut tentang pembekalan budaya (*cultural awareness training*), diantaranya:

- *Cultural-awareness* (Schwerzel, 2005; Skelton & Cooper, 2005; Kimmel, 1998)
- *Cultural literacy* (McFarland, 2005)
- *Cultural competence* (McFarland, 2005; Rubinstein, 2003)
- *Cultural intelligence as a construct in management/business literature* (Earley & Ang, 2003)
- *Cultural intelligence as a military concept* (Coles, 2005)
- *Transcultural skills as a leadership competency for transforming organizations* (Graen & Hui, 1999)
- *Intercultural competence* (Elron, Halevy, Ben-Ari & Shamir, 2003)<sup>23</sup>

Kok Yee dkk (2005) menyebutnya dengan istilah Cultural Quotation (CQ), yakni menunjuk pada suatu kemampuan individu untuk berhubungan dan sosialisasi dengan orang lain yang berasal dari latar belakang dan pemahaman budaya yang berbeda.<sup>24</sup>

Dari beberapa istilah yang disampaikan oleh para pakar di atas, Kok Yee, Ng, dan kawan-kawan sependapat dengan apa yang disampaikan McFarland (2005), yang membedakan antara “*cultural literacy*” dan “*cultural competency*”, dimana kemampuan yang terakhir tersebut disebutnya sebagai “*critical leadership competency*”. Untuk itu antara prajurit dan pemimpinnya haruslah mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang budaya sehingga mereka akan dapat bersosialisasi di lingkungan tempat mereka bertugas.

Lebih lanjut menurut McFarland (2005) bahwa:

*“cultural literacy” is about understanding one’s own individual patterns and one’s own cultural norms. To be culturally competent in a multinational or coalition operation, military leaders need to have the metacognitive skills (to understand and appreciate other cultures including other military or national cultures, cultures of other non-military organisations, adversary/host cultures, and how these cultures differ from one’s own), cognitive skills (to acquire the different cultural knowledge), motivation (to learn about other cultures and operate dengan their military and non-military counterparts and hosts) and behaviours (to execute culturally-appropriate verbal and non-verbal messages).*<sup>25</sup>

Selanjutnya, Harry C Triandis (2004) mendefinisikan cultural quotation (CQ) sebagai suatu kemampuan

23 Kok Yee, Ng, Regena Ramaya, Tony M.S., Teo, dan Siok Fun, Wong. 2005. *Cultural Intelligence: Its Potential For Military Leadership Development*. <http://www.internationalmta.org/Documents/2005/2005033P.pdf>

24 *Ibid*

25 *Ibid*

perorangan untuk beradaptasi dengan baik di lingkungan budaya yang berbeda bangsa, organisasi, maupun profesi.

CQ memiliki empat faktor yakni: (1) *Strategy*; (2) *Knowledge*; (3) *Motivation*; (4) *Behavior*.<sup>26</sup>

Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa dengan CQ yang memadai, hal ini dapat membantu individu dan organisasi untuk mengatasi hambatan budaya (*cultural barriers*) dan mensinergikan perbedaan tersebut untuk mencapai suatu "*win-win outcomes*".<sup>27</sup> Sehingga dengan kemampuan ini dapat diatasi adanya hambatan budaya, sehingga dapat membantu pemecahan masalah yang bermuara pada keberhasilan bersosialisasi.

Jennifer V. Chandler (2005) dengan mengutip definisi yang disampaikan oleh Head Quarter U.S. Marine Corps (USMC) dan the American, Britain, Canada, Australia Cultural Awareness (ABCA) Project Team, membedakan beberapa istilah yang berkaitan dengan apa yang dia sebut "*a tactically ground-centric term*":

**"Cultural Factors.** *Cultural Factors are dynamic aspects of society that have the capacity to affect military operations. They include religion, ethnicity, language, customs, values, practices, perceptions and assumptions, and driving causes like economy and security. All these factors affect the thinking and motivation of the individual or group and make up the cultural terrain of the battle-space. Not all factors are applicable to all operations, and additional factors may be considered as necessary.*"

**"Cultural Awareness (CA).** *CA is the knowledge of Cultural Factors and an understanding of their impact on the planning and conduct of military operations.*"<sup>28</sup>

Dengan mempunyai kesadaran budaya tersebut, hal ini dapat meningkatkan kepekaan dan pemahaman terhadap kelompok etnis lain. Hal ini biasanya akan berujung pada perubahan dalam diri individu tersebut menyangkut perilaku dan nilai-nilai di dalam dirinya. Selanjutnya Diane L. Adams (1995) mendefinisikan CA sebagai berikut:

*Cultural Awareness develops sensitivity and understanding of another ethnic group. This usually involves internal changes in terms of attitudes and values. Awareness and sensitivity also refer to the qualities of openness and flexibility that people develop in relation to others. Cultural awareness must be supplemented with cultural knowledge.*<sup>29</sup>

Sependapat dengan Ting-Toomey (1999), Weaver (2000) dan Klein (2004), Jennifer V. Chandler (2005) dalam tesisnya yang berjudul *Why Culture Matters: An Empirically-Based Pre-Deployment Training Program*, mengatakan bahwa:

*Culture is conceptualized analytically by generating cultural awareness (i.e. the appropriate knowledge, skills, and attitudes) through cross-cultural communications training. Cross-cultural communication provides for awareness of our own biases, knowledge of similarities and differences, culture shock and ethnocentric expectation management tools, language training, and customs and courtesies.*<sup>30</sup>

26 Tridanis, Harry C (2004). University of Illinois at Urbana-Champaign, Copyright © 2004 Center for Cultural Intelligence, Nanyang Technological University, Singapore. <http://www.cci.ntu.edu.sg/>

27 Ibid

28 Jennifer V Chdanler (2005), *Op.Cit*, halaman 35

29 Diane L. Adams (Ed.). (1995). *Health issues for women of color: A cultural diversity perspective*. Thousand Oaks: SAGE Publications. [http://cecp.air.org/cultural/Q\\_howdifferent.htm](http://cecp.air.org/cultural/Q_howdifferent.htm)

30 Jennifer V Chdanler. (2005), *Why Culture Matters: An Empirically-Based Pre-Deployment Training Program*, halaman 35

# 7. Konsep Pembekalan Budaya Dalam Program Pelatihan

Dari berbagai penjelasan dan pendapat tersebut di atas, dengan adanya kesadaran budaya dapat membantu para personel, khususnya personel militer yang bertugas pada misi perdamaian, sehingga dapat memiliki kemampuan untuk memahami adanya perbedaan dalam suatu lingkungan misi operasi perdamaian yang multi-kultur, multi-dimensi dan multi-aktor. Sehingga hal ini dapat bermanfaat untuk mengatasi adanya hambatan budaya yang mungkin timbul dan dapat menjembatani perbedaan itu menjadi suatu sinergi, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang tidak saling merugikan diantara mereka yang terlibat dalam suatu misi operasi perdamaian tersebut.

Program pelatihan pembekalan budaya perlu diberikan kepada setiap anggota pasukan penjaga perdamaian. Pelatihan ini harus mengandung beberapa factor, seperti: pelatihan apa yang diinginkan dan bagaimana, siapa yang memerlukan pembekalan budaya tersebut, siapa yang harus menyampaikan, bagaimana pelatihan itu, kapan dan dimana pelatihan tersebut dilaksanakan, dan apakah pelatihan tersebut dapat merespons persyaratan yang diinginkan.

## 1. Pelatihan apa yang diinginkan dan bagaimana?

Depatemen *Peacekeeping Operation* PBB membuat suatu kurikulum yang disebut dengan *The 5th Standard Generic Training Module* (SGTM), modul ini berkaitan dengan "*Attitudes and Behaviors*" bagi personel yang akan menjadi pasukan perdamaian PBB. Modul ini dijadikan acuan oleh Negara-negara anggota PBB untuk mendidik para peorsnel kontingen nasionalnya. Adapun isi dari modul tersebut adalah sebagai berikut:

- 5 A - '*Code of Conduct*'
- 5 B - '*Cultural Awareness*'
- 5 C - '*Gender & Peacekeeping*'
- 5 D - '*Child Protection*'<sup>31</sup>

*Cultural awareness* merupakan salah satu isi dari modul yang dapat dijadikan acuan bagi pembekalan budaya oleh Negara-negara anggota, sehingga hal ini akan berkaitan antara persyaratan yang diinginkan dengan materi pelatihan yang dapat disampaikan kepada peserta pelatihan.

---

31 SGTM 5 B: Cultural Awareness, [www.un.org/depts/dpko/training](http://www.un.org/depts/dpko/training)

Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa materi tersebut adalah bahwa personel penjaga perdamaian/*Peacekeeper* mewakili PBB dan negara asalnya, tantangan tugas yang semakin kompleks seiring dengan banyaknya aktor yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan misi tersebut.<sup>32</sup>

## 2. Siapa yang memerlukan pembekalan budaya tersebut ?

Lingkungan atau keadaan yang multi kultur dalam setiap operasi pemeliharaan perdamaian adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Di satu pihak keadaan ini memang suatu realitas, di sisi lain siapapun yang andil dalam misi tersebut hendaknya menyikapinya dengan baik. Sebab misi utama inilah yang harus dicapai. Dalam misi tersebut digambarkan sebagai suatu keadaan yang memang melibatkan banyak aktor diantaranya:

- a. *National contingents*
- b. *Diverse personel who work for diplomatic, humanitarian and other civilian agencies*
- c. *Military and civilian organizations involved in establishing and sustaining missions*
- d. *International staff and local communities*
- e. *Different ethnic groups in conflict*<sup>33</sup>

Seorang personel penjaga perdamaian hendaknya mampu untuk siap terjun di kancah konflik atau pasca konflik dan memiliki sikap hormat dan paham terhadap keanekaragaman budaya yang ada di lingkungan tersebut.

## 3. Siapa yang harus menyampaikan?

Pembekalan budaya merupakan materi praktis yang dapat disampaikan oleh seorang instruktur yang

berpengalaman yang pernah menjadi anggota pasukan penjaga perdamaian atau berdasarkan pengalaman perjalanannya dan bergaul dengan lingkungan yang berbeda budaya.<sup>34</sup> Hal ini penting mengingat bahwa tanpa mengalaminya sendiri maka seorang instruktur akan sulit menjelaskan tentang masalah ini. Pengalaman yang diperoleh akan lebih meyakinkan kepada peserta latihan tentang penggambaran suatu realita di medan operasi yang sesungguhnya.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman kepemimpinannya dalam suatu lingkungan yang multinasional, hal ini sangat bermanfaat apabila seorang komandan dapat berbagi informasi dan pengalamannya sehingga anggota pasukan lain yang akan diterjunkan ke medan operasi selanjutnya dapat belajar dari pengalaman tersebut. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan *cross-cultural education* di lingkungan militer.<sup>35</sup>

Untuk itu maka falsafah tentang 'pengalaman adalah guru yang terbaik' sangat relevan dengan masalah ini. Sehingga dengan demikian akan dapat lebih meyakinkan anggota pasukan lainnya untuk belajar dari pengalaman para pendahulunya yang pernah bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB.

## 4. Bagaimana?

Black and Mendenhall (1991) mengajukan beberapa kerangka kerja dalam rangka penyelenggaraan pembekalan budaya yang di sebut "*the myriad cross-cultural training methods*" yang terbagi menjadi tiga kategori:

- a. *Factual (e.g., area briefings, lectures, books);*
- b. *Analytical (e.g., classroom language training, case*

32 *ibid*

33 *Ibid*

34 *Ibid*

35 Kok Yee, Ng, Regena Ramaya, Tony M.S., Teo, dan Siok Fun, Wong.2005. *Op.Cit.*

*studies, culture assimilators, sensitivity training);*  
*and*

- c. *Experiential (e.g., interactive language training, role plays, field trips, and simulations).*<sup>36</sup>

Dengan mengutip pendapat berbagai pakar lain, Jennifer V. Chandler (2005) menyarankan bahwa suatu pendekatan terhadap pembekalan budaya, pertamanya perlu mendiskusikan konsep budaya yang ada di dalam lingkungan budayanya sendiri, kemudian menerapkannya dalam konteks perbandingan dengan apa yang ada di dalam budaya lain.<sup>37</sup>

## 5. Kapan dan dimana pembekalan itu disampaikan?

Dalam Conluding Report 1997-2002, Challenges of Peace operations into the 21st century, (2002:244), disebutkan bahwa:

*Classroom briefing or lectures are very useful to introduce topic, but static presentation (power Point, etc) should not be abused. Training should be realistic, interactive and comprehensive, so instructors should be skilled in handling meaningful group work for brainstorming, problem solving, case study, role-playing and dramatization, debates and round tables, workshops and seminars.*<sup>38</sup>

Selanjutnya penggunaan alat bantu dalam pelatihan juga diperlukan dalam rangka menyediakan suatu gambaran terhadap keadaan sebenarnya.

*Training aids help in creating atmosphere, which is similar to the mission environment. In this area of training aids, Member States will be primarily responsible for the acquisitions of the materials.*<sup>39</sup>

## 6. Apakah pembekalan budaya tersebut dapat memberikan respon terhadap persyaratan yang diharapkan

Dalam kurikulum SGTM yang dikeluarkan oleh PBB, dinyatakan bahwa setelah diberikan pembekalan budaya adalah pada akhirnya para calon anggota penjaga perdamaian tersebut dapat terbiasa dan peka terhadap konsep kesadaran budaya dan bagaimana mereka mampu bekerja efektif dalam lingkungan yang multi kultur tersebut.<sup>40</sup> Berdasarkan dengan tujuan akhir dari pembekalan tersebut maka pembekalan budaya yang diberikan harus dapat menjawab tujuan akhir yang diharapkan.

---

36 *Ibid.*

37 Jennifer V. Chdanler (2005), Op.Cit halaman 35

38 Conluding Report 1997-2002, Op.Cit, halaman 244

39 *Ibid*, hal. 245

40 SGTM 5 B: *Op.Cit.*

## 8. Penutup

Tulisan ini mengulas tentang perlunya pembekalan budaya bagi para calon anggota satuan penjaga perdamaian di bawah naungan PBB. Seperti diketahui, operasi penjaga perdamaian di masa depan akan semakin kompleks yang melibatkan banyak unsur, baik militer, kepolisian maupun masyarakat sipil lainnya seperti LSM dan pers. Operasi penjaga perdamaian juga multi-nasional, sehingga perlu usaha-usaha serius untuk menjembatani perbedaan budaya yang pasti terjadi.

Medan operasi penjaga perdamaian pun semakin kompleks, menyangkut kepentingan-kepentingan politik dunia yang semakin beragam pula. Mengingat diperkirakan peran Indonesia akan meningkat di masa depan dan akan semakin diharapkan peran aktifnya, persiapan yang memadai bagi para anggota pasukan perdamaian ini perlu dilakukan. Pembekalan budaya merupakan pelatihan yang sangat penting untuk mengatasi kemungkinan yang paling buruk yang terjadi di medan operasi ini. Karena itu, peran masyarakat sipil, baik dari LSM maupun pers, dalam pembekalan budaya ini sangat diperlukan.

## 9. Daftar Pustaka

- Adams, Diane L. (Ed.) (1995). *Health issues for women of color: A cultural diversity perspective*. Thousand Oaks: SAGE Publications. [http://cecp.air.org/cultural/Q\\_howdifferent.htm](http://cecp.air.org/cultural/Q_howdifferent.htm)
- Concluding Report 1997-2002. *Challenges of Peace Operations into the 21st Century*. Eldaners Gorab: Stockholm. 2002
- Getso, Robert. *Preparing Warriors to be Peacekeepers*. [http://www.class.uidaho.edu/martin\\_archives/peace\\_journal/Peacekeeping/Peacekeeping1.doc](http://www.class.uidaho.edu/martin_archives/peace_journal/Peacekeeping/Peacekeeping1.doc)
- Harry C, Tridanis (2004). *University of Illinois at Urbana-Champaign, Center for Cultural Intelligence*, Nanyang Technological University, Singapore. <http://www.cci.ntu.edu.sg/>
- Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/25/IX/2005, 27 September 2005. Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI Tentang Operasi Perdamaian Dunia.
- Ng, Kok Yee, Regena Ramaya, Tony M.S., Teo, dan Siok Fun, Wong (2005). *Cultural Intelligence: Its Potential For Military Leadership Development*. <http://www.internationalmta.org/Documents/2005/2005033P.pdf>
- Nuciari, Marina (2002). *Flexibility Towards Diversity. New Skills for Military Personnel in PSOs. Submitted to the Annual Conference 2002 of the Committee on Women in NATO Forces*. Nato HQ. Brussel,
- SGTM 5 B: *Cultural Awareness*, [www.un.org/depts/dpko/training](http://www.un.org/depts/dpko/training)
- The Charter of the United Nations*, <http://www.un.org/aboutun/charter/>
- Training and Preparation of Military and Civilian Peacekeepers Summary of Proceedings Aberfoyle House, Magee College. University of Ulster, 13-15 June 1996*. [www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No10/Anyidoho.html](http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No10/Anyidoho.html) - 27k
- Wahlgren. *The Training dan Preparation of Military Peacekeepers* [www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No10/Anyidoho.html](http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No10/Anyidoho.html) - 27
- Media Indonesia 1 September 2006.
- Harian Sinar Harapan 30 Agustus 2006.

## 10. Bacaan Lanjutan

MacQueen, Norrie. *Peacekeeping and the International System*, London: Routledge, 2006

Butler, Michael J. . *International Conflict Management*. London: Routledge, 2009

Murphy, Ray, Katarina Mansson (Eds.). *Peace Operations and Human Rights*. London: Routledge, 2009

Diehl, Paul F. *International Peacekeeping: Perspectives on Security*. The John Hopkins University Press, 1994

Thakur, Ramesh. *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect*. Cambridge/New York, 2006.

Greindl, Günther. *Multilateral Cooperation in Peace Support Operations: Challenges and Limitations: Austrian Blue Helmet Forum 2006*. Vienna, 2006

# 11. Lampiran

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG  
KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PERDAMAIAN DI LEBANON

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berperan aktif dalam ikut menciptakan perdamaian dunia melalui pengiriman Kontingen Garuda dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) di berbagai kawasan dunia;
  - b. bahwa atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1701 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Penghentian Pertempuran antara Israel dan Hezbollah, kondisi konflik di Lebanon telah memasuki tahap gencatan senjata menuju pada perdamaian;
  - c. bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Republik Indonesia dapat ikut serta dalam rangka mewujudkan perdamaian di Lebanon, dan hasil pertemuan konsultasi antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Agustus 2006, dipandang perlu mengirimkan Kontingen Garuda untuk misi perdamaian di Lebanon;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon;

Mengingat : ...

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PERDAMAIAN DI LEBANON.

PERTAMA : Membentuk Kontingen Garuda untuk bergabung dalam *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)*, dalam rangka melaksanakan misi perdamaian di Lebanon.

KEDUA : Kebijakan dalam rangka penyiapan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

KETIGA : ...

- 3 -

KETIGA : Penyiapan kekuatan TNI sebagai Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan pemberangkatannya, dilaksanakan oleh Panglima TNI sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Menteri Luar Negeri melakukan :

1. koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkaitan dengan pengiriman Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA;

2. koordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berkaitan dengan Mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.

- KELIMA :
1. Anggaran operasional Kontingen Garuda dalam misi *UNIFIL* dibebankan kepada PBB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan berkoordinasi dalam rangka penyiapan anggaran yang diperlukan untuk persiapan dan pemberangkatan Kontingen Garuda termasuk dalam melakukan *reimbursement* kepada PBB atas biaya operasional Kontingen Garuda di Lebanon.

KEENAM : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing.

KETUJUH : ...

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands